IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN URUSAN ADMINISTRASI DAN TATA USAHA PADA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG

Ida Farida, Nanik Sudarsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas
Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung

Email: ida.farida@ubl.ac.id; n4nikfarel@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Apa sajakah aspek yang menghambat dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian kualitatif. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data (*display*) dan menarik kesimpulan (*verifikasi*). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sudah efektif dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan bagian masing-masing dan aspek yang menghambat dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, dana operasional, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh pegawai dan integritas kepemimpinan, kurangnya sumber daya manusia pegawai dalam bidang Iptek serta terbatasnya pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kata Kunci: Implementasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Urusan Administrasi dan Tata Usaha,
Ditnarkoba Polda Lampung.

ABSTRACT

The problem in this writing is how the implementation of the main tasks and functions of the Administrative and Administrative Affairs Section at the Lampung Police Drug Research Directorate and what are the aspects that hinder the implementation of the main tasks and functions of the Administrative and Administrative Affairs Section at the Lampung Police's Drug Research Directorate. This type of research used in this research is through a qualitative research method approach. The process of qualitative data analysis is carried out by the stages of data reduction, data presentation (display) and drawing conclusions (verification). Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the main tasks and functions of the Administrative and Administrative Affairs Section at the Lampung Regional Police's Drug Research Directorate has been effective in carrying out tasks in accordance with their respective sections and aspects that hinder the implementation of the main tasks and functions of the Administrative Affairs Section and Administration at the Lampung Regional Police's Drug Research Directorate, including organizational structure, human resources, operational funds, location, facilities owned, integrity of all employees and integrity of leadership, lack of human resources for employees in the field of science and technology and limited funding allocated for carrying out tasks. principal and function.

*Keywords: Implementation, Main Duties and Functions, Administration and Administration Affairs,
Lampung Police Dirnarkoba.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang umumnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Bab II Pasal 8 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga diperjelas dalam Bab I, Pasal 1 ayat ke 4 bahwa Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun 2002).

Polri adalah sebuah lembaga penegak hukum yang independen yang memiliki prinsip-prinsip sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 3 yakni:

1. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki
2. Prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan
4. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Nesesitas, yaitu dalam penentuan jabatan struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Program-program pembaruan di tubuh Polri merupakan bagian dari reformasi birokrasi Polri agar kedepannya Polri menjadi sebuah institusi yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini kinerja birokrasi di Indonesia cenderung bersifat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya pemerintah merespon keinginan masyarakat dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Adanya patologi di dalam sebuah birokrasi antara lain seperti rendahnya kualitas dan profesionalitas aparatur kepolisian, produktivitas dan disiplin kerja yang masih rendah serta beberapa perilaku menyimpang lainnya dalam birokrasi. Oleh karena itu, semakin besarnya tuntutan bagi aparat kepolisian untuk mengedepankan *good governance* di setiap kinerjanya, dimana masyarakat menuntut adanya kinerja yang transparan dan akuntabel pada lembaga birokrasi.

Kerangka Revitalisasi ini terdiri dari 3 (tiga) komponen (Mabes Polri, 2010) yaitu pertama, penguatan institusi. Kedua, terobosan kreatif. Dan ketiga, peningkatan integritas. Kepolisian Daerah Lampung sebagai salah satu intitusi Polri yang ada di Indonesia, yang juga menerapkan program Kapolri tentang “revitalisasi Polri” menuju pelayanan prima di setiap fungsi satuan kerjanya. Namun dalam melaksanakannya Kepolisian Daerah Lampung tidak lepas dari berbagai permasalahan yang ada. Dalam menjalankan proses reformasi birokrasi, Polri banyak menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri serta longgarnya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan sebuah komitmen dari seluruh jajaran anggota Polri serta peran masyarakat agar ikut serta memberikan pengawasan terhadap berjalan atau tidaknya “revitalisasi Polri” menuju pelayanan prima ini. Karena secara umum komitmen dan tekad kepolisian untuk melakukan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan yang lebih prima adalah

berita baik yang patut untuk ditunggu dan ditagih realisasinya di lapangan secara terus menerus.

Polda Lampung meraih peringkat 25 dari 31 Polda yang diukur dalam ITK. Total skor ITK sebesar 5,225 masuk skala kategori “sedang”. Skor tersebut dikontribusikan oleh Sembilan Satuan Kerja (selanjutnya disingkat dengan Satker), yakni Satker Pembinaan Masyarakat (Binmas), Lalu Lintas (Lantas), Inteljen dan Keamanan (Intelkam), Polisi Perairan (Polair), Reserse Kriminal Umum (Reskrim), Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), Reserse Narkoba (Res Narkoba), Samapta Bhayangkara (Sabhara), Sumber Daya Manusia (SDM). Satker yang memperoleh skor tertinggi di Polda Lampung adalah Lantas, disusul Reskrimsus, Binmas, dan Polair. Sedangkan Satker yang mendapat skor terendah adalah SDM, Res Narkoba dan Intelkam. (Gaussyah, dkk, 2015: 153).

Satker Resnarkoba Polda Lampung mendapat nilai 4,50 dari skala 1-10. Hasil ini masih di bawah rata-rata nasional 5,60. Prinsip yang mendapat nilai terendah di satker ini adalah prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Kedua prinsip tersebut tersebut hanya mendapat angka 1 dari skala 1-10. Rendahnya prinsip efektifitas Res Narkoba karena ketidaktersediaan data perbandingan jumlah kasus yang ditangani dan jumlah kasus yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan (P21). Adapun prinsip lain yang mendapat nilai rendah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip ini diukur berdasarkan penilaian AKIP yang dilakukan oleh Itwasda (Gaussyah, dkk, 2015: 157).

Pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung terutama dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba sepenuhnya dipegang oleh Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bagian yaitu Urusan Perencanaan (Urren), Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) dan Urusan Keuangan (Urkeu). Selanjutnya, Urmintu bertugas menyelenggarakan kegiatan

administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) dan menuangkan ke dalam Skripsi dengan judul **“Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Selanjutnya, peneliti rumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung?
2. Apa sajakah aspek yang menghambat dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Moleong (2004:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif ini juga dimaknai dengan serangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola pikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang lengkap dari permasalahan yang bersifat umum. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari

permasalahan yang bersifat khusus kepada yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambar yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Rakhmat, 2015: 25).

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

II. HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Poda Lampung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan terutama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S. selaku Kasubbag Renmin mengemukakan bahwa:

“Bentuk komunikasi ke bawah yang tercipta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha berupa menyampaikan pesan atau perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas pokok administrasi Renmin dalam rangka berjalannya organisasi secara wajar, terutama meneruskan surat-surat dan membuat produk Renmin selain surat menyurat ada perencanaan dan tata usaha”.

Menurut D.O. selaku Kaurmintu mengemukakan bahwa:

“Bentuk komunikasi ke atas yang tercipta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha yaitu menerima pesan atau melaksanakan perintah dari Kasubbag Renmin seperti membalas surat-surat dari instansi luar yang berkaitan dengan tugas-tugas Urmintu (Urusan Administrasi dan Tata usaha) serta membuat surat-surat yang berkaitan dengan anggota seperti perintah untuk anggota pada saat-saat dibutuhkan, misalnya membuat surat untuk pelaksanaan kegiatan upacara, kegiatan donor darah, pengajian dan lain-lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu A.R. selaku personil mengemukakan bahwa:

“Komunikasi dalam organisasi sudah mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bagian Administrasi dan tata Usaha pada Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, komunikasi berjalan dengan baik, melalui HP ataupun komunikasi secara langsung”.

Menurut R.S. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Komunikasi sudah tercipta secara efektif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha, karena dengan adanya handpone dan komputer akan memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik serta dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok bagian administrasi dan tata usaha”.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan M.A. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Komunikasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha sudah berjalan dengan baik dan efektif karena adanya handpone dan komputer sehingga memudahkan komunikasi”.

Menurut penulis komunikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi dan Tata Usaha merupakan bentuk pertukaran gagasan di antara pimpinan dan bawahan dalam suatu birokrasi dalam hal ini adalah Subbag renmin dan bawahannya yang menyebabkan terwujudnya instansi tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam instansi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi dan manajemen)). Untuk mencapai tujuan bersama harus dipikirkan bagaimana komunikasi internal dapat memotivasi para pegawai atau publik internal untuk saling bekerjasama antara satu individu dengan individu yang lain dan antara satu bagian dengan bagian yang lain.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung antara lain manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S. selaku Kasubbag Renmin mengemukakan bahwa:

“Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Subbag Renmin dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha yaitu berkaitan dengan jaman teknologi saat ini sumber daya manusia masih kurang kebanyakan dari SMA, diperlukan sarjana IT karena saat ini pekerjaan banyak menggunakan aplikasi online”.

Menurut D.O. selaku Kaurmintu mengemukakan bahwa:

“Sumber daya yang ada di bagian Urmintu pada Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kebanyakan wanita dan masih ada yang tamatan SMA, di mana saat ini merupakan jaman teknologi yang hampir semua dilakukan secara online hambatan yang kami hadapi adalah jaringan terkadang lemot, sehingga menghambat pekerjaan misalnya menerima dan mengirim surat melalui Email, mengerjakan aplikasi-aplikasi menjadi terhambat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu A.R. selaku personil mengemukakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang ada pada bagian Administrasi dan Tata Usaha pada Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kebanyakan adalah wanita, di mana terkadang ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh laki-laki misalnya mengantar surat-surat ke Instansi dan Satker lain. Atau pekerjaan untuk mengangkat material logistik anggota seperti pada saat pengambilan perlengkapan tersebut di Biro Logistik dan pembagian perlengkapan kepada anggota Narkoba”.

Menurut R.S. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Dukungan sumber daya manusia belum efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha, terutama untuk urusan mengirim surat menyurat ke luar Satker Dit Res Narkoba, karena dalam pelaksanaan tugas bagian administrasi dan Tata Usaha pada direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung banyak wanita. Sementara untuk urusan pengiriman diperlukan laki-laki. Ditambah juga dengan Dukungan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sangat tidak mencukupi”.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan M.A. selaku pegawai bahwa:

“Sumber daya manusia sudah efektif masing-masing staf pada Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing”.

Menurut penulis bahwa sumber daya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi dan Tata Usaha adalah apa saja yang mendukung pergerakan (mobilisasi) Bagian Administrasi dan Tata Usaha Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, baik itu berasal dari sumber daya manusia,

fasilitas, sarana dan prasarana kerja dan lain sebagainya. Sumber daya manusia adalah “manusia yang mempunyai unsur penting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan tantangan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai menghadapi berbagai tantangan, baik sifatnya internal maupun eksternal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya. Sedangkan, sumber daya fasilitas, sarana dan prasarana merupakan peralatan yang mendukung dan digunakan oleh sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Terkait dengan banyak sumber daya manusia di Bagian Administrasi dan Tata Usaha Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu didominasi oleh perempuan, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas terutama tugas luar maupun tugas pengangkutan, maka sejalan dengan pendapat Coate dan Frey (2000) bahwa terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh Gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu :

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan Struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh *reward* dan insentif yang diberikan kepada individu di dalam suatu profesi. Sifat dan pekerjaan yang sedang dijalani membentuk perilaku melalui sistem *reward* dan insentif, maka laki-laki dan perempuan akan merespon dan mengembangkan nilai etis dan moral secara sama di lingkungan pekerjaan yang sama. Pendekatan Struktural menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan di dalam profesi tersebut akan memiliki perilaku etis yang sama.

b. Pendekatan Sosialisasi

Pendekatan Sosialisasi Gender menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan membawa seperangkat nilai yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun ke dalam suatu lingkungan

belajar. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan Gender ini akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan dan praktik. Laki-laki akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung melanggar peraturan yang ada karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan. Laki-laki mementingkan kesuksesan akhir atau *relative performance*, perempuan lebih mementingkan *self-performance*. Perempuan akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga perempuan akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi (sikap) merupakan bentuk kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana pelaksanaan terutama dalam tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S. selaku Kasubbag Renmin mengemukakan bahwa:

“Disposisi (sikap) Subbag Renmin dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha yaitu kurangnya tenaga khususnya untuk pria karena di Subbag Renmin terutama di bagian urmintu (Urusan Administrasi dan Tata Usaha) kebanyakan wanita”.

Menurut D.O. selaku Kaurmintu mengemukakan bahwa:

“Karena kurangnya tenaga laki-laki terkadang pekerjaan yang berkaitan dengan pengambilan dan pembagian perlengkapan untuk anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menjadi terhambat, karena pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga, seperti

mengangkat Perlengkapan Pakaian Dinas Anggota, mulai dari baju, celana, ikat pinggang, pangkat, sepatu dan lain-lain. Karena jumlah anggota yang banyak maka perlengkapannya pun menjadi banyak. Sehingga kami meminta bantuan dari tenaga honorer laki-laki untuk mengangkat barang-barang tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu A.R. selaku personil mengemukakan bahwa:

“Pimpinan sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Administrasi dan tata Usaha pada kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik”.

Menurut R.S. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi Administrasi dan Tata usaha dibagian Urmintu sudah efektif dan berjalan lancar, hanya saja perlu diperhatikan dan lebih teliti lagi dalam memberi lembar disposisi pada lembaran surat masuk dan surat keluar. Serta harus lebih diperhatikan dalam mengantar surat harus dengan buku ekspedisi keluar sebagai bukti penguat jika terjadi kehilangan surat yang telah kita kirim”.

Ditambahkan oleh M.A. selaku pegawai bahwa:

“Pelaksanaan tugas pokok fungsi administrasi dan tata usaha di Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sudah efektif dan berjalan lancar”.

Menurut penulis bahwa sikap (disposisi) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi dan Tata Usaha merupakan suatu kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu obyek dalam hal ini adalah Bagian Administrasi dan Tata Usaha Ditresnarkoba Polda Lampung, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangkan atau tidak menyenangkan obyek tersebut. Sikap (disposisi) ini dapat berasal dari pembuat kebijakan, pimpinan dan bahkan dapat berasal dari bawahan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan S. selaku Kasubbag Renmin mengemukakan bahwa:

“Struktur birokrasi yang ada saat ini mampu menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi dan Tata Usaha sudah cukup sesuai dengan struktur yang ada, masing-masing punya karakter dan masing-masing punya ilmu sesuai bagianya”.

Menurut D.O. selaku Kaurmintu mengemukakan bahwa:

“Implementasi Struktur Birokrasi pada bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berjalan sesuai baik, sesuai dengan bagianya masing-masing. Tugas-tugasnya sudah terbagi-bagi sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing personil”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu A.R. selaku personil mengemukakan bahwa:

“Struktur Birokrasi pada bagian Administrasi dan Tata Usaha pada Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Menurut R.S. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian administrasi dan tata usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung struktur birokrasi atau pembagian kerja serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta perlunya komitmen pegawai terhadap pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.A. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

Struktur birokrasi atau pembagian kerja serta tanggung jawab masing-masing pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian administrasi dan tata usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sudah berjalan lancar walau terkadang ada pekerjaan-pekerjaan dadakan terkendala oleh jaringan internet sehingga agak menghambat dan harus sabar menunggu”.

Menurut penulis bahwa struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi dan Tata Usaha merupakan bentuk kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi. Jika seseorang memiliki suatu wewenang, maka dia harus dapat mempertanggung-jawabkan wewenangnya tersebut. Dilihat dari struktur organisasi terlihat bahwa pada Bagian Adminsitasi dan Tata Usaha menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dianalisis bahwa sebagaimana hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang telah dilakukan oleh Subbag Renmin dalam konteks komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya sangat baik. Hal ini bisa diketahui dari keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung secara utuh. Melalui kegiatan tata usaha dan administrasi ini karena dilakukan oleh Subbag Renmin yang memiliki garis komando yang tegas dan baik.

Subbag Renmin memiliki sumber-sumber mencakup manusia yang cakap. Hal ini mengingat orang yang menjadi bagian dari Subbag Renmin adalah merupakan orang pilihan dan telah melaksanakan serangkaian pelatihan-

pelatihan administrasi dan tata usaha secara khusus. Namun memang saat ini dari segi jumlah pegawai Subbag Renmin yang ada di Subbag Renmin masih kurang. Maksud dari kurang ini adalah masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, hal ini terkait dengan perubahan status Polda dari B ke A.

Subbag Renmin memiliki kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana. Kecenderungan ini berupa sikap tegas dan patuh dalam melaksanakan amanat yang diterima. Oleh karena itu disposisi yang bersifat positif ini secara tidak langsung memiliki dampak yang baik dalam pelaksanaan program kerja. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tata usaha dan administrasi ini pasti terlaksana dengan baik, hanya saja memang ada kendala berupa berupa peralatan dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung yang masih minim.

Subbag Renmin memiliki struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan berjalan dengan rapi. Setiap organisasi atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu didasarkan pada jabatan/kedudukan yang dimiliki sesuai yang tertera dalam struktur organisasi. Kepatuhan bawahan terhadap atasannya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari ketika di kantor ataupun di luar kantor. Hal inilah yang menjadikan tingkat solidaritas di Subbag Renmin menjadi kokoh. Karena memang jika dilihat dengan baik akan diketahui bahwa kegiatan tata usaha dan administrasi yang dilaksanakan memiliki dampak yang baik, karena memang Subbag Renmin sudah terbiasa melakukan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung telah dilaksanakan secara efektif terutama dalam kaitannya dengan komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

Keempat komponen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

B. Aspek yang Menghambat dalam Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan S. selaku Kasubag Renmin mengemukakan bahwa:

“Faktor yang perlu diperhitungkan dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yaitu dengan melihat kemampuan internal organisasi antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, dana operasional, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas ancaman atau tantangan. Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya, misalnya perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi”.

Menurut D.O. selaku Kaurmintu mengemukakan bahwa:

“Dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, bukan semata bersifat internal seperti input proses manajemen, tetapi juga lingkungan eksternal. Walaupun faktor lingkungan eksternal ini sering kali berada di luar jangkauan intervensi organisasi, namun mengingat keterpengaruhannya yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi, maka kiranya faktor lingkungan eksternal tetap harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja suatu organisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu A.R. selaku personil mengemukakan bahwa:

“Perkembangan di lingkungan internal dan eksternalnya, tentunya kembali pada spesifikasi permasalahan yang dihadapinya, apakah permasalahan itu pada aspek inputnya atau aspek proses manajemennya, yang kemudian pada sisi mana dari aspek tersebut yang paling diprioritaskan kembali untuk dibenahi, baru kemudian dapat ditentukan upaya-upaya relavan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Adapun faktor penghambatnya antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia pegawai dalam bidang Iptek.
Disadari bahwa tidak semua pegawai dalam lingkup administrasi dan tata usaha memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang komputerisasi. Di lingkungan Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sendiri masih sangat terbatas sekali pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer, bahkan masih ada pegawai yang kurang mampu mengoperasikan program komputer dalam menunjang kegiatan administrasi dan tata usaha.
- b. Terbatasnya pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung”.

Menurut R.S. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Aspek yang menghambatdalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung antara lain:

1. Faktor sumber daya manusia
Masalah sumber daya manusia, di mana kemampuan personil yang ada di Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) belum optimal. Berangkat dari kondisi tersebut,

mengakibatkan belum optimalnya kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam.

2. Faktor sarana dan prasarana

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan administrasi dan tata usaha diperlukan berbagai penunjang seperti peralatan teknologi. Kondisi peralatan teknologi antara lain komputer, printer, jaringan internet yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung perlu dilakukan penambahan dan pergantian peralatan karena kondisi peralatan sudah banyak yang tidak dapat dipergunakan kembali”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.A. selaku pegawai mengemukakan bahwa:

“Aspek yang menghambatdalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yaitu:

1. Infrastruktur kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih kurang optimal.
2. Aksesibilitas/konektivitas jaringan internet masih kurang memadai sehingga terdapat kesulitan dalam kegiatan tugas dan fungsi.
3. Sumber daya manusia masih kurang memadai.
4. Dukungan pemerintah daerah masih belum optimal.
5. Anggaran masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa setiap aspek tersebut mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja organisasi/instansi pemerintah, baik berpengaruh dalam arti negatif (menjadikan lemahnya kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja). Di samping faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi suatu kebijakan dari pemerintah, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi, juga Satker di Reserse Narkoba Polda Lampung.

Kapasitas organisasi dapat memberi kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi oleh hal-hal yang menghambat (produk dari) tiga hal pokok yaitu: struktur organisasi, personel (*human resources*) dan finansial. Tiga hal tersebut bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah) akan tetapi mungkin saja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan sistem.

Struktur yang ketat dan tersentralisir akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dan sebagainya) maka keberhasilan implementasi nampaknya akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, ahli, dan mempunyai motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realita. Hal ini akan lebih berhasil lagi apabila juga didukung oleh kondisi finansial yang memadai.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dilihat dari empat variabel yang disampaikan oleh Edward III bahwa:
 - a. Secara komunikasi dari atas ke bawah Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sangat berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh kuatnya garis komando di Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, antara atasan dan bawahan.
 - b. Dilihat dari segi sumber daya maka terdapat kelemahan yang masih dimiliki Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung adalah masih lemahnya anggaran yang tersedia dan sedikitnya dukungan

sumber daya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.

- c. Disposisi yang ada dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha adalah keinginan untuk melaksanakan tugas dari atasan yang dominan. Karena kepatuhan atas jenjang kepangkatan itulah membuat jajaran pelaksana program selalu berbuat sebaik mungkin dalam pelaksanaan program kerja.
 - d. Dari segi struktur organisasi dan susunan anggota memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sangat jelas, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program kerja yang ada.
2. Aspek yang menghambat dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bagian Urusan Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, dana operasional, fasilitas yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia pegawai dalam bidang Iptek serta terbatasnya pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak Kepolisian Daerah Lampung hendaknya meningkatkan kembali anggaran dan saran prasarana yang ada. Mengingat pentingnya kegiatan administrasi dan tata usaha membuat segenap kegiatan harus dilaksanakan dengan baik. Anggaran untuk membina administrasi dan tata usaha perlu untuk ditingkatkan setiap tahunnya, kemudian dilanjutkan dengan terus berkolaborasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penting dilakukan.
2. Hendaknya dilakukan penambahan pegawai/personil pada Bagian Administrasi dan Tata Usaha pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung karena dianggap masih kurang dan juga perlu untuk ditingkatkan lagi. Dengan adanya persoalan atas kurangnya personil sesuai dengan ketentuan yang ada harus segera ditangani oleh Polda Lampung melalui penambahan jumlah pegawai/personil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Zulva Rizky. 2018. *Pelaksanaan Pelayanan Tata Usaha di SMK Batik 1 Surakarta. Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*. Volume 2 Nomor 2.
- Coate, C and Frey, K. 2000. *Some Evidence on the Ethical Disposition of Accounting Students : Context and Gender Implications*". *Teaching Business Ethis*. Vol 4 No 4, pp: 379-404.
- Daryanto, H.M. 2017. *Administrasi Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gaussyah, dkk. 2015. *Mewujudkan Polri yang Profesional Melalui Penguatan Tata Kelola*. Biro Reformasi Birokrasi Polri. Jakarta.
- Kunarto. 2017. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Levinso. 2014. *Peranan*. Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mabes Polri. 2010. *Kebijakan Operasional Polri 2010 untuk Mewujudkan Pelayanan Prima*. Mabes Polri. Jakarta.
- Marliani, Lina. 2017. *Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal FISIP Universitas Galuh*.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2014. *Administrasi Pendidikan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rakhmat, Jalaludin. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Murni, Sylviana. 2016. *Education Management*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sayuti, Abdul Jalaluddin. 2014. *Manajemen Perkantoran*. Alfabeta. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Suhardono, Edy. 2014. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implementasi)*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Sutopo. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi. 2015. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Wirawan, Sarlito. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Raja Wali Pers. Jakarta.